

Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya

Wardatul Mutmainnah¹, Siti Tiara Maulia²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jambi^{1,2}

*E-mail: wardatumutmainnah015@gmail.com

Abstrak

Penerapan sistem demokrasi memainkan peran krusial dalam menjaga persatuan dan keutuhan konstitusi suatu negara. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana demokrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat persatuan dan memelihara konstitusi melalui analisis studi kasus dan teori politik. Demokrasi menyediakan mekanisme untuk partisipasi publik yang luas dan transparan dalam proses pengambilan keputusan, mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif di kalangan warga negara. Melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia, demokrasi memperkuat stabilitas politik dan sosial. Penegakan hukum yang efektif dalam sistem demokrasi memastikan bahwa konstitusi dan aturan hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem demokrasi sangat bergantung pada komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kinerja institusi hukum yang independen. Dalam konteks ini, pendidikan politik memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Melalui pendidikan politik yang inklusif dan mendalam, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih sadar akan pentingnya demokrasi dalam menjaga persatuan, keutuhan konstitusi, dan penegakan hukum yang adil.

Kata kunci: demokrasi, konstitusi, penegakan hukum



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah konsep yang menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat itu sendiri. Ini mewakili prinsip dasar demokrasi di mana pemerintahan harus mengikuti kehendak dan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Artinya, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Konsep ini sering dikaitkan dengan cita-cita untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Prinsip demokrasi yang demikian itu merupakan pijakan awal dari pendidikan politik yang harus dipahami dalam perspektif kebangsaan dan kenegaraan untuk melihat dan mengkritisi kinerja dan produk lembaga politik baik suprastruktur (legislatif, eksekutif dan yudisial) maupun infrastruktur (partai politik, tokoh politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan). Demokrasi yang dianut dan dijalankan oleh bangsa Indonesia secara filsafati telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara substansial mencakup adanya hak hidup bangsa dan menghapuskan penjajahan, mewujudkan kemerdekaan, adanya keyakinan atas ketuhanan dan cita-cita luhur yang

kemudian dibentuklah pemerintahan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melihat pada pola pikir bangsa Indonesia yang demikian menunjukkan, bahwa Indonesia telah melaksanakan sistem demokrasi yang sesuai dengan jiwa bangsa dengan pandangan hidupnya yakni demokrasi Pancasila. Bahkan karakteristik dan hakekat demokrasi telah menjadi perekat dicetuskannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai tonggak kebangkitan generasi muda bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan kesejahteraan bangsa yang dicitakannya. Nilai demokrasi dalam Sumpah Pemuda juga didengungkan terus yang kemudian terbentuklah nilai-nilai kepahlawanan yang secara fisik, moral, lahir dan batin tergunakan sebagai senjata yang secara heroik mampu mengoyak dan merontokkan kekejaman penjajahan baik yang dilakukan penjajah maupun beberapa anggota masyarakat bangsa Indonesia sendiri yang diperalat oleh penjajah untuk menindas bangsanya sendiri, yang kemudian banyak dikenal dengan semangat kepahlawanan dan dikenang sebagai Hari Pahlawan (10 November).

Untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, kita perlu mengasah apa yang disebut etos politis dalam demokrasi. Budi Hardiman dalam bukunya *Demokrasi dan Sentimentalitas* menjelaskan yang dimaksud etos politis dalam demokrasi adalah energi atau mentalitas yang menggerakkan individu-individu untuk menjalankan demokrasi. Satu kepala tentu tidak cukup untuk membangun suatu demokrasi yang ideal, diperlukan suatu kesadaran kolektif untuk menyikapi hal ini. Barangkali, kita perlu mengikutsertakan apa yang disebut oleh Adorno, salah satu tokoh teori kritis (mazhab frankfurt) sebagai *Erziehung zur Mundigkeit*, yakni pendidikan untuk kedewasaan dalam penerapan demokrasi.

Dalam era modern yang kompleks dan dinamis, penerapan sistem demokrasi telah menjadi landasan utama bagi banyak negara dalam menjaga persatuan, menghormati konstitusi, dan menegakkan hukum. Demokrasi bukan hanya sekadar bentuk pemerintahan, tetapi juga sebuah sistem yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana penerapan sistem demokrasi dapat secara efektif memperkuat persatuan, menjaga kehormatan konstitusi, dan memastikan penegakan hukum yang adil dan merata.

Selanjutnya, dalam konteks menjaga konstitusi, sistem demokrasi menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat pemerintah dan warga negara. Konstitusi menjadi panduan yang jelas bagi pengaturan kekuasaan, pembagian kewenangan, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dengan adanya lembaga-lembaga independen seperti badan yudikatif yang kuat, konstitusi dapat dijaga dan ditegakkan secara konsisten, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Di samping itu, penegakan hukum yang efektif merupakan pijakan penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Prinsip supremasi hukum menjamin bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama, dan tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum. Dengan lembaga penegak hukum yang independen dan transparan, pelanggaran hukum dapat diselidiki dan ditegakkan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus.

Demikianlah pentingnya penerapan sistem demokrasi dalam menjaga persatuan, menghormati konstitusi, dan menegakkan hukum. Melalui partisipasi aktif warga negara, penghargaan terhadap konstitusi, dan penegakan hukum yang adil, sebuah negara dapat memperkuat fondasi demokratisnya dan memastikan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Metode

Metode penulisan artikel ini adalah dengan literature study atau studi pustaka dengan menganalisis secara teoritis mengenai penerapan sistem demokrasi untuk menjaga persatuan dan konstitusi serta penegakan hukumnya. Literature study ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan

yang berhubungan dengan topik dan kasus yang akan dibahas yang berupa buku- buku, jurnal dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema artikel.

Hasil dan Pembahasan

Konstitusi Mendorong Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dalam menjamin Demokrasi

Konstitusi memainkan peran kunci dalam menetapkan kerangka kerja untuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam menjaga demokrasi. Dampak dari transparansi dan akuntabilitas itu juga dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintahan. Di satu sisi akan menjadi warisan (legacy) kepemimpinan dari pemerintahan, dan di sisi lain dapat berdampak pula pada ragam sektor seperti ekonomi salah satunya.

“Kekuasaan ialah sesuatu yang sensitive ,artinya implikasi kekuasaan harus dibatasi sehingga seorang pemilik kekuasaan tidak dengan semena-mena merefleksikan kekuasaan dalam kinerja yang menyebabkan kesengsaraan orang yang dikuasai.Dikehendaki agar kekuasaan yang menjadi otoritasnya agar tidak disalahgunakan”.(Dr.Drs.Ismail Nurdin,M.Si,2017).Dalam proses terselenggaranya suatu peraturan dalam tata kelola pemerintahan yang baik proses keterbukaan dapat mengawasi secara ketat terhadap keuangan public dan memperhatikan aktivitas tersebut termasuk penyusunan anggaran publik dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta adanya tanggungjawab yang berjalan bersamaan pada prinsip demokrasi demi tercegahnya kasus korupsi ,terhindarnya kesalahan alokasi dana pada investasi.Konstitusi dapat mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan public.

Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu Negara yang menetapkan struktur, fungsi dan batas-batas kekuasaan pemerintah. Dalam konteks demokrasi, konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan system tata negara dengan cara berikut: 1) Menetapkan Prinsip Dasar: Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi system tata negara, seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan hak asasi manusia. Prinsip ini membantu menjaga stabilitas dan ketahanan system tata Negara meskipun ada perubahan zaman; 2) Menjamin Hak Asasi Manusia: Konstitusi menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu. Ini membantu melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi; 3) Membatasi Kekuasaan Pemerintah :Konstitusi menetapkan batas –batas kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini membantu menjaga system tata negara yang demokratis dan mencegah terjadinya tirani atau otoritarianisme; 4) Menyediakan Mekanisme Perubahan : Konstitusi juga menyediakan mekanisme untuk perubahan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Misalnya, melalui proses amendemen, konstitusi dapat diubah untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang berubah; 5) Menjaga Keseimbangan Kekuasaan : Konstitusi membagi kekuasaan antara berbagai cabang pemerintah eksekutif, legislative, dan yudisial. Pembagian ini memastikan bahwa tidak ada satu cabang pun yang memiliki kekuasaan absolute dan menjaga sistsem checks and balances.

Dalam konstitusi, menetapkan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana pemerintahan harus beroperasi. Ini termasuk menetapkan kekuasaan pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan konstitusi menciptakan sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintah yang dapat bertindak di luar batas yang ditetapkan oleh hukum. Konstitusi juga seringkali mencantumkan hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak atas informasi dan partisipasi dalam proses politik. Konstitusi dapat menetapkan aturan yang memastikan bahwa proses pengambilan keputusan pemerintah terbuka dan dapat diakses oleh publik. Misalnya, beberapa konstitusi mewajibkan pemerintah untuk melakukan pertemuan terbuka atau memberikan akses kepada warga negara untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan dengan keputusan pemerintah. Menetapkan aturan tentang keharusan pemerintah untuk mengungkapkan informasi

kepada publik tentang kegiatan mereka, termasuk anggaran, pengeluaran, dan kebijakan. Ini memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada warga negara.

Selain itu, konstitusi dapat memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika mereka percaya bahwa pemerintah telah melanggar aturan transparansi atau akuntabilitas. Hak-hak ini memungkinkan warga negara untuk memantau tindakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban ketika pemerintah tidak beroperasi secara transparan atau akuntabel. Misalnya, kebebasan pers dan kebebasan berbicara adalah aspek penting dari demokrasi yang didukung oleh banyak konstitusi.

Kemudian konstitusi dapat menciptakan badan pengawas atau mekanisme pengaduan independen yang bertugas memantau pemerintah dan memeriksa pelanggaran hukum atau etika. Misalnya, beberapa negara memiliki komisi anti-korupsi atau auditor independen yang bertugas menyelidiki kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Akhirnya, konstitusi dapat memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga independen, seperti pengadilan atau komisi pengawas, untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini penting karena menghindari keterlibatan langsung pemerintah dalam menafsirkan atau menegakkan aturan-aturan ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan Sistem Demokrasi dalam Menjaga Persatuan dan Demokrasi

Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini berarti bahwa semua suara dianggap penting dan setiap individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Dengan demikian, demokrasi memungkinkan inklusivitas yang luas, yang membantu memastikan bahwa berbagai kelompok dalam masyarakat merasa diwakili dan dihargai. Partisipasi politik dalam demokrasi juga dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dengan memungkinkan akses yang lebih besar ke proses pengambilan keputusan, demokrasi memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesetaraan dalam masyarakat.

Sistem demokrasi memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui pemilihan umum dan proses politik terbuka lainnya, warga dapat memantau tindakan pemerintah dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Ini menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk bertanggung jawab dan mengurangi risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks persatuan, demokrasi mempromosikan dialog dan negosiasi antara berbagai kepentingan dan pandangan. Dalam sistem demokratis, warga diajak untuk berdiskusi secara terbuka tentang perbedaan pendapat mereka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Ini membantu menghindari konflik dan meningkatkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat yang beragam. Selain itu, sistem demokrasi mempromosikan perlindungan hak asasi manusia. Dalam lingkungan demokratis, kebebasan sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat biasanya dihormati dan dilindungi. Ini penting dalam menjaga martabat individu dan mencegah penindasan oleh pemerintah atau kelompok yang berkuasa.

Demokrasi juga membantu memperkuat lembaga-lembaga demokratis, seperti parlemen, pengadilan independen, dan media yang bebas. Institusi-institusi ini berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan yang mendominasi penuh dalam sistem politik. Dengan demikian, demokrasi membantu mencegah otoritarianisme dan menjaga pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Penerapan sistem demokrasi tidak hanya tentang proses politik, tetapi juga tentang membangun budaya demokratis yang kuat dalam masyarakat. Ini melibatkan pendidikan publik tentang nilai-nilai demokrasi, pengembangan pemimpin yang bertanggung jawab, dan pembangunan kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan memperkuat fondasi demokrasi ini, persatuan dan demokrasi dapat terjaga dengan lebih baik dalam jangka panjang.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Sistem Demokrasi

Penegakan hukum (law of enforcement) tidak bisa lepas dari rangkaian adanya kaidah hukum atau peraturan; aparat penegak hukum, fasilitas yang diperlukan dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum pada prinsipnya sebagai upaya melaksanakan atau menerapkan aturan hukum sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dapat pula dikatakan merupakan penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam pola perilaku.

Prinsip dasar filsafati penegakan hukum telah ditegaskan dalam konstitusi kita, yaitu di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip dasar filsafat penegakan hukum dalam konstitusi mencakup beberapa aspek penting yang memberikan landasan bagi sistem hukum suatu negara. Pertama-tama, prinsip supremasi hukum adalah fondasi utama dalam filsafat penegakan hukum. Ini berarti bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang mengikat semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang di atas hukum, dan setiap orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada aturan hukum yang sama.

Penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem demokrasi adalah prinsip yang vital untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam demokrasi, kekuasaan ada pada rakyat, dan penegakan hukum menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menegakkan aturan hukum yang adil bagi semua warga negara. Penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem demokrasi membutuhkan independensi dari kekuasaan politik. Ini berarti lembaga-lembaga penegak hukum harus bebas dari intervensi politik dan mempunyai otoritas yang cukup untuk bertindak secara independen, tanpa takut akan campur tangan politik yang bisa memengaruhi proses hukum.

Selain itu, akses yang adil terhadap sistem peradilan adalah prasyarat penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat akses ke sistem peradilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Penegakan hukum yang berkeadilan juga memerlukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, hak-hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh negara, dan lembaga penegak hukum harus bekerja untuk melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau pihak-pihak yang berwenang.

Penggunaan kekuatan oleh lembaga penegak hukum harus proporsional dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum tidak dapat diterima dalam sistem demokrasi yang berkeadilan, dan pelanggaran seperti itu harus diinvestigasi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang berkeadilan juga membutuhkan sistem hukum yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman masyarakat. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat, serta memperhitungkan perspektif-perspektif yang berbeda dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil juga penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem demokrasi. Kerjasama ini dapat memperkuat integritas dan efektivitas lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi penting bagi pembangunan dan pemeliharaan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi sangat penting dalam penegakan hukum karena memiliki beberapa dampak positif yang signifikan. Pertama, pemahaman yang baik tentang demokrasi membantu memperkuat legitimasi institusi-institusi hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, mereka lebih cenderung untuk mempercayai dan menghormati lembaga-lembaga penegak hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

demokrasi juga dapat memperkuat partisipasi publik dalam proses hukum. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, mereka lebih mungkin untuk terlibat aktif dalam proses peradilan, termasuk melaporkan pelanggaran hukum, memberikan kesaksian, atau bahkan menjadi anggota juri dalam persidangan.

Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi dapat membantu masyarakat memahami pentingnya aturan hukum dalam menjaga perdamaian dan stabilitas sosial. Masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum cenderung lebih patuh terhadap aturan dan lebih mematuhi hukum, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kejahatan dan konflik dalam masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang demokrasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat memahami hak-hak dan kewajiban mereka, mereka lebih mungkin untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, serta menuntut pertanggungjawaban jika ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum.

Kemudian, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dapat membantu memperkuat hubungan antara warga negara dan pemerintah. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem demokrasi dan proses penegakan hukum, mereka merasa lebih terlibat dan berdaya dalam mempengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan partisipasi publik dalam sistem hukum, tetapi juga membantu menjaga perdamaian, stabilitas, dan akuntabilitas dalam masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa penerapan sistem demokrasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam menjaga persatuan, menghormati konstitusi, dan menegakkan hukum. Dengan memberikan ruang untuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, menjaga kebebasan berbicara, serta menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara, sistem demokrasi dapat membantu mencegah konflik internal, memperkuat persatuan, dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Serta untuk memperkuat penerapan sistem demokrasi, diperlukan pendidikan politik dan pemahaman masyarakat terhadap makna kedaulatan negara demi menjaga persatuan dan demokrasi yang lebih baik dan terjamin, promosi budaya demokrasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Selain itu, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh arus pengaruh globalisasi yang terjadi di Indonesia terlebih di era otonomi yang sangat rentan dengan berbagai konflik politik dan kepentingan-kepentingan yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Intermasa.
- Asmaroini, Ambiro P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, (No. 1), pp. 50–64.
- Budiardjo, Miriam, 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Gafar, Afan, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI dan CV Sinar Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Pito, Toni Adrianus 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik, Dari Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sidharta, Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Fossati, Diego., Aspinall, Edward., Muhtadi, Burhanuddin., & Warburton, Eve. (2020). Ideological Representation In Clientelistic Democracies: The Indonesian Case. *Electoral Studies*, Vol. 63, (No. 1), pp. 1-12.
- Gumbira, Jamal Wiwoho Seno W. (2019). The Implication of The Globalization on The Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 6, (No. 2), pp. 361–378.
- Huda, Muhammad C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 1, (No. 1), pp. 78–99.